BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita – cita serta memiliki sifat khusus dalam penjaminan dalam berlangsungnya eksistensi bangsa dan negara di kemudian hari maka seorang anak mendapatkan kesempatan secara luas untuk tumbuh dan kembang secara maksimal baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak secara mulia. Selain itu seorang anak pun membutuhkan upaya perlindungan hukum dengan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan setiap hak anak tanpa terdapat perlakuan diskrimnasi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut. Penjelasan umum anak atau *juvenile* merupakan seorang yang usianya masih dibawah umur, yang belum dewasa serta seorang tersebut belum pernah kawin. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang batas usia kedewasaan seorang anak yang berbeda – beda. Perbedaan batas usia kedewasaan seorang anak yaitu usia kesejahteraan anak dan usia perkawinan. Batas usia seorang anak berhubungan dengan kematangan jiwa seorang anak, sehingga terdapat batas usia minimum dan batas usia maksimum. Batas usia minimum berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, dan batas usia maksimum berhubungan dengan pemberlakuan hukuman khusus terhadap seorang anak apabila anak tersebut telah mencapai batas usia maksimum.

2.1.1 Anak

Pengertian tentang anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu *“amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.* ¹“ Selain itu juga terdapat pula beberapa macam pengertian anak menurut beberapa Undang – Undang, diantaranya yaitu :

1. Menurut Pasal. 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

“Seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.”²

2. Menurut Pasal. 1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :

“Anak merupakan seseorang yang dalam perkara anak nakal sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.”³

3. Menurut Pasal. 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

“Dikatakan sebagai seorang anak apabila usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.”⁴

¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

² Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

4. Menurut Pasal. 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 yaitu :

“Anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”⁵

2.1.2 Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Tujuan perlindungan terhadap anak diatur didalam Ps. 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dengan tujuan untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶ Tujuan perlindungan anak diatur juga didalam Ps. 2 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*) diantaranya adalah :

⁴ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974

⁶ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. “Negara – negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak yang ditetapkan dalam konvensi hak anak terhadap hak anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diperlakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal – usul bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara – negara peserta akan mengambil langkah – langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”⁷

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perlindungan anak antara lain :

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.

⁷ Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child).

3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
6. Tidak bersifat insidental atau kebetulan dan komplementer atau pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.⁸

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, seorang anak mempunyai hak – hak yang harus dipenuhi dan hak anak

⁸ Maidin Gultom, 2009, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hlm 37.

tersebut haruslah dilindungi oleh hukum yang telah diatur oleh perundang – undangan yang berlaku, diantaranya adalah :

1. Perlindungan hukum anak yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlindungan anak yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Perlindungan anak dibidang pendidikan diatur didalam Ps. 31 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Perlindungan kesejahteraan sosial anak diatur didalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak – Hak Anak yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*.
6. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan.

2.1.3 Hak – Hak Anak

Hak – hak seorang anak diatur didalam konvensi hak – hak anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori, diantaranya ⁹:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*“The Right to Survival”*) adalah suatu hak untuk melestarikan serta mempertahankan hidup (*“The Right of Live”*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak. ¹⁰Contoh hak untuk melangsungkan hidup antara lain :
 - a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak anak tersebut dilahirkan.
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya.
 - c. Anak dilidungi dari kesalahan perlakuan oleh negara (*“abuse”*).
 - d. Hak memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus terhadap anak – anak penyandang cacat (*“disabled”*).
 - e. Hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak dan tanggung jawab dari orang tua anak tersebut.
 - f. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma – cuma oleh negara terhadap anak yang kurang mampu.

⁹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35

¹⁰ Konvensi Hak Anak

- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dan narkotika.
 - h. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas penganiayaan seksual dan eksploitasi anak, termasuk mendapatkan perlindungan terhadap prostitusi dan keterlibatan pornografi.
 - i. Hak mendapatkan perlindungan terhadap anak dalam pencegahan terjadinya penjualan, penyelundupan, serta penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (*“Protection Rights”*) merupakan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga.¹¹ Bentuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan diskriminasi diantaranya :
- a. Adanya perlakuan nondiskriminasi terhadap hak
 - hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, serta terhadap anak penyandang cacat.
 - b. Adanya perlindungan eksploitasi dan perlakuan salah dari orang tua., serta memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu, dan perlindungan terhadap anak dalam pekerjaan

¹¹ Konvensi Hak Anak.

yang mengancam kesehatan, pendidikan, perkembangan anak, perlakuan atau hukuman kejam, penyiksaan, pidana mati atau seumur hidup, serta penahanan semena mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*“Development Rights”*) adalah hak anak yang diatur didalam konvensi hak – hak anak yang berbentuk pendidikan baik formal maupun nonformal serta berbentuk hak untuk tercapainya standar kehidupan yang layak terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, moral serta sosial anak (*“the right of standart of living”*). Bentuk hak anak dalam hal tumbuh kembang diantaranya adalah :

- a. Hak untuk memperoleh informasi.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan.
- c. Hak untuk bermain dan rekreasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
- e. Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama
- f. Hak untuk perkembangan kepribadian.
- g. Hak untuk memperoleh identitas.
- h. Hak memperoleh kesehatan dan fisik.
- i. Hak untuk didengar pendapatnya.
- j. Hak untuk berkeluarga.¹²

¹² M. Nasir Djamil, **Anak Bukan untuk Dihukum**. Sinar Grafika: Jakarta. 2012. Hlm 14-16

4. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak untuk menyatakan pendapat seorang anak.¹³ Makna dari hak untuk berpartisipasi ini adalah :

- a. Hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak memperoleh informasi untuk berekspresi.
- c. Hak berkumpul.
- d. Hak memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.¹⁴

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan bukan semata – mata sebagai bentuk beban terhadap anak tersebut, namun kewajiban terhadap anak dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan anak tersebut memiliki kepribadian yang baik. Bentuk kewajiban seorang anak diatur dalam Ps. 19 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban anak yang diatur didalam undang – undang tersebut adalah :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁵

¹³ Konvensi Anak.

¹⁴ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan untuk Dihukum**. Sinar Grafika: Jakarta. 2012. Hlm

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Anak merupakan status yang diperoleh anak pada saat menjalani hukuman pidana di LPKA berdasarkan hasil keputusan pengadilan, dimana anak tersebut usianya paling maksimal yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi menurut hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu seorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena disangka telah melakukan tindak pidana.¹⁶

Penjelasan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Ps. 1 angka 3 UU SPPA yaitu terdapat 3 pembagian, diantaranya :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak)

Anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁸

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi)

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

¹⁵ Pasal 19 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ UNICEF, 2006, Child Protection Sheet.

¹⁷ pasal 1 angka 3 UU SPPA

¹⁸ pasal 1 angka 3 UU SPPA

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁹

2.2.1 Hak – Hak Narapidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak – hak seorang anak pada umumnya perlu diperjuangkan pada umumnya dalam proses peradilan pidana adalah :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak – hak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, serta mampu menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping dari penasehat hukum atau pengacara.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi dan penyuluhan sebagai langkah untuk memperlancar pemeriksaan.
5. Hak dalam memberikan pendapat.
6. Hak akan diberlakukannya persidangan tertutup.
7. Hak untuk mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara manusiawi sesuai diatur didalam pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.
8. Hak untuk mampu berhubungan dengan keluarganya terutama orang tuanya.

¹⁹ pasal 1 angka 3 UU SPPA

2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Anak Memperoleh Pendidikan.

Pengertian pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.”²⁰ Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non formal, untuk pendidikan formal yaitu berupa pemberian pendidikan minimal selama 9 (sembilan tahun) yaitu 6 (enam) tahun untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), 3 (tiga) tahun untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama 3 (tiga tahun). Untuk pendidikan non formal atau informal diantaranya pelatihan maupun pembinaan terhadap anak baik secara rohani, fisik, maupun mental, dan setiap anak memiliki perlindungan hak dalam memperoleh pendidikan baik pendidikan secara formal ataupun non formal atau informal.

Hak memperoleh pendidikan merupakan suatu hal utama yang dibutuhkan bagi seorang anak untuk mencapai cita – citanya dimasa depan, maka dari itu pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan kepada semua anak minimal anak tersebut memperoleh pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun.

²⁰ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Bandung juga berhubungan dengan teori bekerjanya hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*” yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum yang terdiri dari lembaga hukum, peraturan perundang – undangan, dan budaya hukum.

Tujuan seorang anak diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk memperoleh haknya adalah :

1. Optimalisasi perkembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik anak.
2. Mengembangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan asasi.
3. Berkembangnya rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, nilai – nilai sosial.
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak untuk kehidupannya.
5. Mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.²¹

Hak seorang anak dalam memperoleh pendidikan diatur didalam Ps. 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SISDIKNAS). UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, yaitu Ps. 9, Ps. 48, Ps. 49, Ps. 50, Ps. 51, Ps. 52, Ps. 53, Ps. 54. Seorang anak yang terdapat di dalam LPKA berhak memperoleh pendidikan, hal ini diatur di dalam Ps. 85 dan Ps. 92

²¹ Abintoro, **Hukum Perlindungan Anak**. Laksbang PressIndo: Surabaya. 2016. hlm 68-69.

kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ps. 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SISDIKNAS).

Pasal 12 ayat (1)

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing – masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.²²

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal – pasal yang mengatur tentang pendidikan diantaranya :

²² Pasal 12 ayat 1 UU SISDIKNAS.

Pasal 9

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan.”²³

Pasal 48

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”²⁴

Pasal 49

“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”²⁵

Pasal 50

“Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

²³ Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Pasal 48 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Pasal 49 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.”²⁶

Pasal 51

“Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”²⁷

Pasal 52

“Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”²⁸

²⁶ Pasal 50 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Pasal 51 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 53

- (1) “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma -cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.”²⁹

Pasal 54

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”³⁰

Pasal yang mengatur tentang pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pasal 12

- “(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

²⁹ Pasal 53 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³¹

Pasal 32

(1) “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

³¹ Pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”³²

Pasal yang mengatur tentang pendidikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu :

Pasal 83 ayat (3)

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.”³³

Pasal 92

- i. “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- ii. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- iii. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

³² Pasal 32 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³³ Pasal 83 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

- iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.³⁴

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal terdapat 8 indikator standar pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat 17 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain :

1. Standar kompetensi lulusan.

Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

2. Standar Isi.

Merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan.

3. Standar Proses.

³⁴ Pasal 92 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

5. Standar Sarana dan Prasarana.

Merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

6. Standar Pengolahan.

Merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan.

Merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.³⁵

3 Penilaian dalam proses pendidikan menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu :

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik.

Dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar.

2. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

Bertujuan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dimana penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran ini merupakan penilaian akhir dalam menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan tertentu.

3. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan ujian nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait dilingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten.³⁶

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

³⁵ Pasal 1 ayat 17 UU SISDIKNAS.

³⁶ PP Nomor 19 tahun 2005.

SKL-SP merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/PaketC, SMK/MAK). Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap pendidikan yaitu :

1. Pendidikan dasar yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri dari SMK/MK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.

Selain itu juga terdapat juga pengaturan jumlah peserta didik dalam satu ruangan kelas yang diatur didalam pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak –

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat yaitu

Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak sebanyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- d. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.³⁷

2.4 Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKA merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.³⁸ Kewajiban LPKA adalah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan LPKA wajib agar

³⁷ Pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

³⁸ Pasal 1 angka 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memindahkan anak yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda.³⁹ Serta memindahkan anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang masa vonis pidananya belum habis dipindahkan ke LP dewasa dengan memperhatikan pembinaan anak.⁴⁰

LPKA memiliki 4 fungsi utama yaitu :

1. Melindungi.
2. Menghukum.
3. Memperbaiki.
4. Merehabilitasi.

Dasar peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam pengaturan Lembaga Pembinaan Khusus Anak antara lain :

1. Ps. 28B ayat (2) Undang UUD 1945.
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴¹
2. UU Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak.
3. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Pasal 86 angka (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

⁴⁰ Pasal 86 angka (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.